Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting
Vol. 3, No. 6, Juni 2026
Hal 1054-1061
E-ISSN : 3032-0550
P-ISSN : 3032-1891
Site : https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema

Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Yulita Widya Putri[1], Muhammad Nuryatno Amin[2]
[1,2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juni 15, 2026
Revised Juni 17, 2026
Accepted Juni 19, 2026

Kata Kunci:

Penghindaran Pajak,
Tata Kelola Perusahaan

Keywords:

Tax Avoidance,
Corporate Governance

ABSTRAK

Metode penelitian ini yakni metode penelitian deskriptif dan metode kuantitatif. Teknik sampling yang dipakai yakni purposeful sampling. Dari kriteria yang sudah diputuskan, ada 20 perusahaan industri real estate terdaftar di BEI antara tahun 2017 hingga 2021. Teknik analisis data dipakai di penelitian ini meliputi analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis klasik, uji koefisien determinan, uji kelayakan model dan uji hipotesis. Temuan memperlihatkan kepemilikan institusional berefek negatif pada penggelapan pajak. Ukuran perusahaan serta komite audit memberikan pengaruh positif penghindaran pajak. Kompensasi eksekutif tak memberikan pengaruh penghindaran pajak.

ABSTRACT

This study used descriptive research with a quantitative approach as its research technique. Purposeful sampling was the term used to describe the sample approach. Twenty firms in the real estate and property industries were listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017–2021 period based on established criteria. Descriptive analysis, multiple linear regression analysis, the classical assumption test, the determinant coefficient test, the model feasibility test, and hypothesis testing are some of the data analysis techniques employed in this study. This study's findings demonstrate how institutional ownership has a detrimental impact on tax evasion. The audit committee and the company's size then have a favourable impact on tax evasion. Executive remuneration, however, is unrelated to tax evasion.

This is an open access article under the CC BY license.

Corresponding Author:

Muhammad Nuryatno
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti,
Jakarta, Indonesia
Email: nuryatno@trisakti.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pajak ialah iuran yang wajib dibayar masyarakat ke negara yang dilandaskan UU yang berlaku sehingga sifatnya memaksa serta tak diberikan balasan atau manfaat secara langsung (Soemitro, 1990). Pada tahun 2015, kontribusi pajak pada penerimaan negara di Indonesia melebihi 80% dari total pemasukan negara. Penerimaan yang diperoleh dari pajak diharapkan dapat dikelola membentuk APBN yang efektif.

Self-assesment system merupakan sebuah sistem yang selama ini digunakan oleh Indoensia. Pada self-assesment system ini, wajib pajak mendapat kepercayaan menghitung, melaporkan, serta menyetorkan sendiri pajak terutang mereka kepada pemerintah tepat waktu. Melalui self-assessment system, pemerintah berharap bahwa hal tersebut berdampak positif bagi masyarakat, yaitu dalam peningkatan kontribusi masyarakat pada penerimaan pajak negara. Dengan demikian, hal tesebut dapat menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai hak dalam keikutsertaan terhadap pembangunan nasional yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat itu sendiri. Namun self-assessment system memiliki sebuah dampak, yaitu pada sistem pemungutan pajak ini tentunya akan memberikan loopholes kepada setiap wajib pajak dalam pelaksanaan pelaporan pajak dengan nilai pajak terutang lebih rendah dari seharusnya.

Fenomena penghindaran pajak juga terjadi di Indonesia dengan mengacu pada rasio pajak di negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bagaimana kemampuan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan yang bersumber dari penerimaan pajak. Kualitas kinerja perpajakan dapat dilihat dari tingkat penerimaan pajak suatu negara. Kebanyakan dari mereka adalah unit bisnis, terhitung sekitar 80%, dan sisanya wajib pajak orang pribadi. Menurut penelitian yang dilakukan antara tahun 2010 hingga 2014, aliran dana haram yang keluar dari Indonesia berjumlah rupiah secara kumulatif. 914 triliun (Suara.com, 2017). Rasio ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak nasional Indonesia tidak ideal.

Risiko suatu perusahaan yakni volatilitas pendapatan perusahaan, yang bisa dihitung memakai rumus standar deviasi harga saham. Jika risiko perusahaan tinggi, hal ini menandakan standar deviasi harga saham perusahaan juga besar. Tinggi rendahnya resiko perusahaan memperlihatkan karakter eksekutif, apakah ia seorang pengambil risiko atau penghindar risiko [6]. Kebijakan pimpinan perusahaan dapat menunjukkan apakah punya kepribadian risk taker atau disebut juga dengan risk averse. Makin besar suatu risiko pada suatu perusahaan, eksekutif akan makin berani mengambil risiko; sebaliknya, makin rendah risiko perusahaan, eksekutif semakin menghindari risiko. Terkait dengan kepribadian eksekutif, akuntabilitas perusahaan ke pemegang saham mendorong insentif pemilik institusional memastikan manajemen perusahaan merumuskan keputusan guna mengoptimalkan kesejahteraan pemilik saham. Menurut penelitian Dewi dan Jati (2014), tingkat risiko perusahaan berdampak pada apakah perusahaan memiliki perilaku penggelapan pajak [2].

2. METODE

Jenis data di penelitian ini yakni data sekunder dan data dipakai yakni data kuantitatif. Data didapat lewat *website* BEI (www.idx.co.id) ataupun *website* tiap perusahaan. Populasi pada penelitian ini ialah perusahaan sector Properti serta Real Estate di BEI dari tahun 2017--2021. Bahwa sampel di penelitian ini dipilih melalui metode *purposive sampling*. Setelah dilakukan *purposive sampling* menurut kriteria yang sudah diputuskan, ada 20 perusahaan sesuai kriteria dengan jumlah data 100 data.

2.1 Definisi dan Pengukuran

Tabel 1. Definisi dan Pengukuran

Definisi	Dimensi	Indikator	Skala
Variabel Dependen			
Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) ialah suatu usaha dalam mengurangi suatu adanya hutang pajak yang wajib dibayar	- Beban Pajak Penghasilan - Laba sebelum Pajak	**Menggunakan rumus:** $ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times -1$ **[4]**	Rasio

Definisi	Dimensi	Indikator	Skala
perusahaan tanpa melanggar UU yang ada **[10].**			
Variabel Independen			
Kompensasi Eksekutif adalah imbalan yang diterima oleh eksekutif perusahaan atas kinerjanya. Kompensasi eksekutif meliputi saham, opsi saham, honor, tunjangan serta insentif. Bahwa ada efek positif kompensasi serta penghindaran pajak **[7].**	Besaran Gaji dan Tunjangan uang yang diterima oleh eksekutif	Diukur dengan mengukur kompensasi eksekutif yaitu menggunakan cara perhitungan melalui gaji dan juga tunjangan yang diterima oleh eksekutif selama satu tahun. **[9]**	Rasio
Ukuran Perusahaan bagian dari faktor yang sangat mempengaruhi pada suatu nilai perusahaan. Bahwa pada Ukuran perusahaan sendiri ialah indikator yang memunculkan kekuatan finansial pada perusahaan **[1]**.	Total aset perusahaan	Diukur menghitung logaritma natural dari total $\mathbf{SIZE = LN\ (Total\ Aset)}$ **[9]**	Rasio
Kepemilikan institusional yakni kepemilikan saham disamping kepemilikan individual dari luar perusahaan **[2].**	- Jumlah saham milik institusional - Jumlah saham beredar	KIS = JSI TMS KIS: Kepemilikan institusional JSI: Jumlah saham milik investor institusi. TMS: Total modal saham beredar **[8]**	Rasio
Komite Audit yakni komite yang didirikan, maupun diangkat serta dihentikan dewan komisaris. Anggota minimal 3 (tiga) orang, dimana terdiri dari dewan komisaris independen merangkap pimpinan komite audit, yakni pihak eksternal netral. **(POJKNo.55/POJK 04/2015)**	Seluruh Komite Audit yang ada di perusahaan	KOA = Σkomite audit **[8]**	Rasio

2.2 Uji Hipotesis

2.2.1 Koefisien Determinasi (Adjuster R^2)

Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi

Persamaan	Adjusted R^2
Regresi Linear Berganda	**0,094**

Sumber: Data yang diolah, 2022

Dari hasil tabel terlihat nilai adjusted R2 0,094, tingkat variabel penghindaran pajak sebagai variabel dependen bisa diuraikan oleh variabel independen 9,4%. 100% - 9,4% = 90,6% bisa diuraikan variabel di luar model ini.

Model Regresi:

ETR = 1,449 - 4,238 COMPENSATION + 0,042 FIRM SIZE - 0,329 INSTITUTIONAL + 0,043 AUDCOMM + ε

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Uji Statistik Deskriptif

Penelitian ini memakai analisa statistik deskriptif guna memberi gambaran subyek penelitian lewat data sampel atau populasi. Tabel ini menguraikan nilai N yang mewakili jumlah data yang digunakan.

Menampilkan nilai minimum dari angka terkecil di variabel. Menampilkan nilai maksimum dari angka paling besar di variabel. Rata-rata mewakili seluruh data untuk variabel itu. Standar deviasi memperlihatkan seberapa jauh data menyimpang dari rata-rata data. Berikut hasil uji statistik deskriptif:

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kuantitatif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Compensation	100	3.332.765.918,00	136.000.000.000,00	32.598.905.409,84	28.610.327.165,76
Firm Size	100	27,51	31,74	29,91	1,033
Institutional	100	0,29	0,97	0,71	0,178
Audcomm	100	3,00	4,00	3,02	0,152
Tax	100	0,00	0,95	0,07	0,157
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data yang diolah, 2022

3.1.2 Penghindaran Pajak (Y)

Penghindaran Pajak dengan pengukuran ETR sebagai variabel dependen memiliki skor paling rendah 0 yang ada di PT Mega Manuggal Property (MMLP) tahun 2017 – 2019, PT Sentul City (BKSL) tahun 2018, PT Metropolitan Land (MTLA) tahun 2020, PT Roda Vivatex (RDTX) tahun 2019 serta 2021 dan skor paling tinggi 0,95 yang ada di PT Bumi Citra Permai (BCPI) tahun 2021. Nilai rata-rata pernyataan ini yakni 0,07 artinya rata-rata penghindaran pajak di perusahaan property sebesar 7 persen. Nilai standar deviasi bagi pernyataan ini yakni 0,157, ini memperlihatkan sebaran penghindaran pajak adalah beragam/bervariasi. Data dapat dikatakan bervariasi apabila nilai nilai standar deviasi > nilai mean.

3.1.3 Kompensasi Eksekutif (X_1)

Kompensasi Eksekutif (X_1) sebagai variabel independen skor terendah adalah 3.332.765.918 yang terdapat di PT Perdana Gapuraprima Tbk (GPRA) tahun 2020 dan skor tertinggi adalah 136.000.000.000 yang terdapat di PT Ciputra Group (CTRA) tahun 2020. Nilai rata-rata pernyataan ini yakni 32.598.905.409,84 yang berarti rata-rata kompensasi untuk eksekutif korporat adalah 32.598.905.409,84. Nilai standar deviasi untuk pernyataan ini adalah 28.610.327.165, hal ini menunjukkan bahwa sebaran kompensasi eksekutif perusahaan adalah beragam/bervariasi. Data dapat dikatakan bervariasi jika nilai nilai standar deviasi > nilai mean.

3.1.4 Ukuran Perusahaan (X_2)

Ukuran Perusahaan (X_2) sebagai variabel independen dengan skor paling rendah yakni 27,51 yang ada di PT Bumi Citra Permai (BCIP) tahun 2021 serta skor paling tinggi yakni 31,74 di PT Bumi Serpong Damai (BSDE) tahun 2020. Nilai standar deviasi bagi pernyataan ini yakni 1,033, ini memperlihatkan sebaran ukuran perusahaan adalah beragam/bervariasi. Data dapat dikatakan bervariasi apabila nilai nilai standar deviasi > nilai mean. Hasil dari pengukuran ini memperlihatkan rata-rata ukuran perusahaan penelitian ini yakni 299,1% yang artinya ukuran perusahaan sangat mempengaruhi tinggi rendahnya Penghindaran Pajak.

3.1.5 Kepemilikan Institusional (X_3)

Variabel Kepemilikan Institusional (X_3) sebagai variabel independen memiliki skor paling rendah yakni 0,29 di PT Bumi Citra Permai (BCIP) tahun 2019 serta skor paling tinggi yakni 0,97 di PT Suryamas Dutamakmur (SMDM) tahun 2019-2021. Nilai standar deviasi bagi pernyataan ini yakni 0,178, ini memperlihatkan sebaran kepemilikan institusional adalah beragam/bervariasi. Data dapat dikatakan bervariasi apabila nilai nilai standar deviasi > nilai mean. Hasil dari pengukuran ini memperlihatkan rata-rata kepemilikan asset dari perusahaan atau lembaga di perusahaan property sebesar 71 persen.

3.1.6 Komite Audit (X_4)

Komite Audit (X_4) sabagai variabel independen memiliki skor terendah adalah 3 yang terdapat di hampir seluruh sampel perusahaan serta skor paling tinggi yakni 4 di PT Metropolitan Kentjana (MKPI) tahun 2019 dan 2021. Nilai standar deviasi bagi pernyataan ini yakni 0,152, ini memperlihatkan sebaran komite audit adalah beragam/bervariasi. Data bisa dikatakan bervariasi apabila nilai nilai standar > nilai mean.

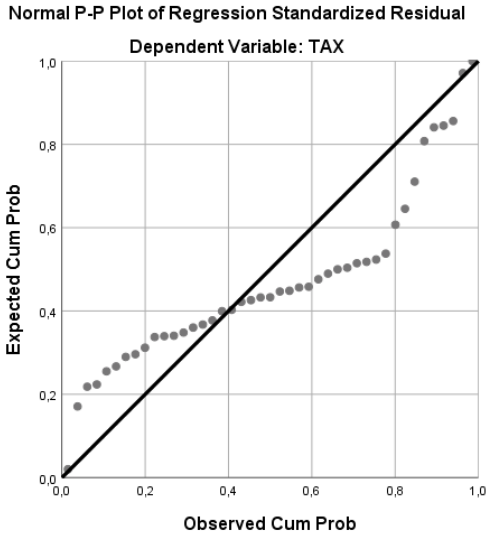
Hasil dari pengukuran ini memperlihatkan variabel Komite Audit pada perusahaan sektor sebanyak 3 orang, yang artinya dengan total Komite Audit yang ada dapat mengawasi perusahaan dari praktik Penghindaran Pajak.

3.1.7 Uji Normalitas

Uji normalitas ditunjukkan guna mengadakan uji apakah di model regresi, variabel punya distribusi normal (Ghozali, 2018). Dengan *Probability Plot* (P-Plot) ketentuan data: Jika titik-titik ataupun data mendekati ataupun sepanjang diagonalnya, maka nilai residualnya bisa dikatakan berdistribusi normal. Jika titiknya berjauhan serta tak sepanjang diagonal, ini memperlihatkan nilai residual tak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas yakni.

3.1.8 Uji Normalitas

Dari grafik keluaran di atas diketahui titik-titik plot yang ada di dalamnya mengikuti dan mendekati diagonal. Karenanya, mayoritas pedoman pengambilan keputusan di pengujian normalitas bisa diambil kesimpulan data berdistribusi normal. untuk memenuhi asumsi normalitas penelitian ini.



Gambar 1. Uji Normalitas
Sumber: Pengolahan data Sekunder, 2022

3.1.9 Uji F

Pengujian secara simultan tujuannya mencari tahu apakah variabel independen punya pengaruh simultan pada variabel dependen dengan melihat nilai signifikansi.

Tabel 4. Hasil Uji F

Persamaan	**Sig**
Regresi Linear Berganda	0,019

Sumber: Pengolahan data sekunder 2022, SPSS 25

Dari hasil tabel bisa diketahui variabel independen memberi pengaruh simultan pada variabel dependen penelitian ini, dan nilai signifikansinya 0,019 ataupun < 0,05 hingga bisa disimpulkan variabel independen simultan memberi pengaruh signifikan pada variabel dependen.

3.1.10 Uji t (Parsial)

Tujuan uji parsial yakni mencari tahu besaran pengaruh tiap variabel independen pada variabel dependen dengan mengetahui nilai signifikansi tiap variabel independen.

Tabel 5. Hasil Uji t

Variabel	**Prediksi Arah**	**B**	**Sig./2**	**Keputusan**
COMPENSATION	H1 (+)	-4,238	**0,325**	H1 Ditolak
FIRM SIZE	H2 (+)	0,042	**0,050**	H2 Diterima
INSTITUTIONAL	H3 (-)	-0,329	**0,011**	H3 Diterima
AUDCOMM	H4 (+)	0,043	**0,039**	H4 Diterima

Sumber: Pengolahan data sekunder 2022, SPSS 25

3.2 Pembahasan

Kompensasi eksekutif tak memberi pengaruh pada penghindaran pajak. Kompensasi ke eksekutif atau CEO dirancang memberi pengaruh kinerja serta menaikkan harga saham perusahaan (Armstrong et al., 2015). Peningkatan kinerja berefek pada peningkatan beban pajak yang wajib dibayar negara. Di sisi lain, perusahaan menaikkan laba sesudah pajak dengan mengurangi pembayaran pajak perusahaan.

Dari hasil penelitian ini, tampaknya kompensasi eksekutif dicapai melalui peningkatan keuntungan dan peningkatan beban pajak. Jadi para eksekutif mencari cara mengurangi pembayaran pajak tinggi. Tapi, kompensasi eksekutif terbatas pada peningkatan kinerja serta efisiensi biaya dan tak melibatkan penghindaran pajak. Supaya eksekutif bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, yang diadakan perusahaan hanyalah merubah sistem kompensasi berupa bonus, tunjangan, dan meningkatkan sistem kompensasi saham. Penelitian ini selaras dengan penelitian [11].

Ukuran perusahaan memberi pengaruh yang positif pada pengelapan pajak. Variable ukuran perusahaan diwakili logaritma natural dari aset perusahaan memberi pengaruh positif pada tarif pajak efektif (ETR). Makin besar ukuran perusahaan, makin besar ETR perusahaan artinya level penggelapan pajak semakin menurun. Perusahaan di ukuran korporasi besar akan memiliki sumber daya ang melimpah yang bisa dipakai bagi keperluan tertentu [5]. Penelitian ini selaras penelitian [13].

Kepemilikan institusional memberi pengaruh positif pada penggelaapan pajak. Melalui kepemilikan institusional perusahaan, tingkat kepatuhan serta kinerja manajemen meningkat. Makin besar kepemilikan institusi, makin besar suara serta dorongan institusi itu guna mengawasi serta mengelola, sehingga memberi insentif lebih besar guna mematuhi aturan pajak [3]. Taruhan besar yang dipegang oleh investor institusi juga dapat mengurangi masalah keagenan dan dengan demikian mengurangi peluang bagi perusahaan untuk menghindari pajak karena lebih mudah bagi institusi untuk memantau kinerja manajemen. Penelitian ini selaras dengan yang dilakukan [12].

Komite audit punya dampak positif pada penghindaran pajak. Fungsi Komite Audit adalah memberi nasihat mengenai hal-hal terkait kebijakan keuangan serta pengendalian internal. Dari teori keagenan, terdapat korelasi timbal balik yang baik antara agen serta prinsipal. Komite audit memainkan peran penting dalam mengendalikan laporan keuangan perusahaan. Komite audit diberdayakan untuk melakukan pengawasan yang bertanggung jawab atas praktik kecurangan ketika mereka menemukan kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan, dan komite audit tak kebal pada penilaian kinerja mereka selama periode tersebut. Hasil penelitian ini selaras teori keagenan dan penelitian [9].

4. KESIMPULAN

Kompensasi eksekutif tak memberi pengaruh penghindaran pajak perusahaan properti serta real estate di BEI 2017-2021. Ukuran perusahaan memberi pengaruh yang positif pada penghindaran pajak perusahaan real estate di BEI selama tahun 2017-2021. Kepemilikan institusional berdampak negatif pada penghindaran pajak perusahaan real estate di BEI, 2017-2021. Komite audit berdampak positif pada penghindaran pajak perusahaan sektor real estate di BEI tahun 2017-2021.

Dalam penelitian ini, ada beberapa keterbatasan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, bisa jadi pertimbangan untuk penelitian guna mendapat hasil yang baik, namun karena beberapa keterbatasan penelitian ini, penelitian ini memiliki objek laporan tahunan yang tidak lengkap. Sesuai dengan uraian peneliti tentang kesimpulan penelitian, implikasi dan keterbatasan, untuk perbaikan penelitian yang akan datang, peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

Penelitian di masa depan sebaiknya fokus terlebih dahulu pada integritas tahunan yang dipakai di pelaporan perusahaan agar tak membuang terlalu banyak data usang.

REFERENSI

[1] A. Denziana and W. Monica, “Analisis ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan (Studi empiris pada perusahaan yang tergolong LQ45 di BEI periode 2011-2014),” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 7, no. 2, pp. 241–254, 2016.

[2] N. N. K. Dewi and I. K. Jati, “Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di Bursa Efek Indonesia,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, vol. 6, no. 2, pp. 249–260, 2014.

[3] N. Hikmah and Sulistyowati, "Pengaruh kepemilikan institusional, profitability, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance (Studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014–2018)," B.S. thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta, 2020.

[4] Y. V. Kusufiyah and D. Anggraini, "Trend penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, vol. 24, no. 1, pp. 1–12, Jan. 2022.

[5] J. M. Nibras and S. Hadinata, "Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, reputasi auditor, dan capital intensity terhadap tax avoidance," *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, vol. 13, no. 2, pp. 241–254, Aug. 2020.

[6] T. Paligorova, "Corporate risk taking and ownership structure," Bank of Canada, Ottawa, ON, Canada, Working Paper 2010-3, pp. 2–41, 2010.

[7] S. O. Rego and R. Wilson, "Equity risk incentives and corporate tax aggressiveness," *Journal of Accounting Research*, vol. 50, no. 3, pp. 775–809, 2012, doi: 10.1111/j.1475-679X.2012.00438.x.

[8] M. Rombebunga and D. A. A. Pesudo, "Tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak," *Perspektif Akuntansi*, vol. 2, no. 3, pp. 237–255, Oct. 2019, doi: 10.24246/persi.v2i3.p237-255.

[9] A. A. Siregar and M. Syafruddin, "Pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap penghindaran pajak (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018)," *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 9, no. 2, pp. 1–11, 2020.

[10] D. Wardani and R. Purwaningrum, "Pengaruh karakteristik perusahaan dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, vol. 14, no. 1, pp. 53–64, 2018, doi: 10.21460/jrak.2018.141.294.

[11] W. Jumiarti and V. I. Nursyirwan, "Pengaruh kompensasi eksekutif, company size, leverage terhadap penghindaran pajak," *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, vol. 5, no. 1, pp. 15–28, Apr. 2026.

[12] S. Muhshi and A. Haq, "Pengaruh Kepemilikkan Institusional, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan, terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020" *Jurnal Ekonomi Trisakti*, vol. 2, no. 2, pp. 2077-2090, Okt. 2022.

[13] Karista and Murtanto, "Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance" *Ebid: Ekonomi Bisnis Digital*, vol. 2, no. 2, pp. 165-174, Des. 2024.